

The Voluntary Carbon Market **Explained**



**Bab 10:
Bagaimana hak
atas
karbon
dipertimbangkan di
pasar karbon
sukarela (VCM)?**

Bab 10: Bagaimana hak atas karbon dipertimbangkan di pasar karbon sukarela (VCM)?

Hak atas karbon menentukan siapa saja yang dapat berpartisipasi dan mendapat manfaat dari kegiatan pasar karbon sukarela (VCM). Pemegang hak atas karbon umumnya adalah mereka yang memegang kendali terhadap kegiatan mitigasi atau terhadap aset (misalnya, tanah) yang mendasari kegiatan mitigasi. Hak atas karbon dapat menjadi rumit untuk ditetapkan dalam VCM, terutama dalam kasus kegiatan solusi berbasis alam atau *Nature-based solutions* (Nbs). Hak atas karbon dapat diatur oleh peraturan dalam negeri atau, jika tidak ada, melalui kontrak.

Apa itu hak atas karbon?

Hak atas karbon memberikan hak kepada pemegangnya untuk mendapatkan manfaat dari pengurangan atau penghilangan emisi gas rumah kaca (GRK). Hak karbon berbeda dari **kredit karbon yang dapat diperdagangkan**. Kredit karbon merupakan pengurangan atau penghilangan emisi GRK yang diverifikasi dan dikeluarkan sesuai dengan aturan lembaga **standar emisi GRK**. Hak atas karbon menentukan hak yang mendasari untuk memperoleh keuntungan dari pengurangan atau penghilangan emisi GRK yang terkait dengan aset (misalnya, lahan atau hutan) atau aktivitas

(misalnya, proyek VCM). Mereka yang memegang hak atas karbon dapat terlibat dalam penerbitan kredit karbon serta **bertransaksi dan mengklaim** hasil dari penjualan kredit karbon. Hak atas karbon juga dapat memberikan hak kepada pemegangnya untuk berpartisipasi dalam **perjanjian pembagian manfaat**.

Bagaimana hak atas karbon ditentukan?

Hak atas karbon ditetapkan berdasarkan **payung hukum atas kendali atas aset dasar dan/atau payung hukum atas pengendalian aktivitas pengurangan dan penghilangan emisi**.

Kendali terhadap aset berarti bahwa pemegang hak atas karbon memiliki properti, pengelolaan, akses, hak pakai atau hak lain atas tanah, infrastruktur, atau sumber daya yang mendukung kegiatan pengurangan atau penghilangan emisi GRK. Entitas yang mengendalikan aset antara lain individu swasta, badan usaha, lembaga swadaya masyarakat (LSM), Masyarakat Hukum Adat dan Warga Lokal (IP & LC), dan pemerintah. Terkait bagaimana hak kepemilikan diberikan biasanya didasarkan pada undang-undang yang mengatur kepemilikan properti di yurisdiksi tempat aktivitas VCM berlangsung.

Pemegang hak atas karbon berdasarkan kepemilikan aset berhak mendapatkan manfaat dari pengurangan atau penyerapan emisi GRK yang dihasilkan dari kegiatan yang menggunakan atau memengaruhi aset tersebut.

Kendali terhadap kegiatan mitigasi berarti sebuah kewajiban bagi entitas terkait untuk menunjukkan bahwa mereka melakukan dan mengendalikan aktivitas pengurangan atau penghilangan emisi GRK. Hak atas karbon juga dapat diklaim oleh pihak-pihak yang menyediakan jasa, modal, atau teknologi (misalnya, oleh pengembang aktivitas dan pemodal); pihak-pihak yang berpartisipasi aktif dalam kegiatan pengurangan atau penghilangan emisi GRK (misalnya, IP &LC); atau pihak-pihak yang memiliki kekuatan untuk mengatur (misalnya, pemerintah nasional atau daerah). Pemegang hak atas karbon berdasarkan kontrol terhadap suatu kegiatan mitigasi berhak mendapatkan manfaat dari hasil pengurangan atau penyerapan emisi GRK dari kegiatan tersebut.

Bagaimana hak atas karbon ditetapkan dalam VCM?

Pengembang aktivitas bertanggung jawab untuk menetapkan hak atas karbon sesuai dengan aturan dari lembaga standar emisi GRK dan persyaratan peraturan apa pun dari negara tuan rumah. Pembentukan hak

atas karbon dalam VCM bisa jadi cukup rumit.

Hak atas karbon dapat relatif mudah ditetapkan dalam kegiatan pengurangan emisi terkait energi dan industri, di mana terdapat sejumlah pihak dengan hak dan pengaturan kontrak yang jelas. Dalam kegiatan non-NbS ini, jumlah pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan terbilang terbatas dan entitas yang mengendalikan kegiatan VCM biasanya juga biasanya memegang hak atas kredit karbon. Entitas tersebut dapat, misalnya, menjaminkan hak ini kepada pembeli atau terlibat dalam penjualan kredit karbon ke depan untuk mengamankan pembiayaan untuk kegiatan VCM.

Hak atas karbon dapat menjadi rumit untuk ditetapkan dalam kegiatan NbS. Kegiatan NbS berlangsung di lahan (misalnya, hutan, pertanian, lahan basah) dan seringkali bertujuan untuk mengubah cara orang menggunakan dan berinteraksi dengan lahan tersebut. Aset lahan atau ekosistem yang mendasarinya seringkali dikendalikan oleh entitas yang berbeda dari pengembang aktivitas. Kegiatan NbS melibatkan banyak aktor dan sering dilaksanakan dalam konteks sertifikat tanah yang secara hukum bersifat lemah atau tidak ada. Ini berarti bahwa mungkin akan ada ketegangan dalam menentukan hak karbon berdasarkan kontrol terhadap aset atau berdasarkan kontrol terhadap kegiatan.

Hak atas tanah dan hutan – formal dan informal – atau kemampuan untuk menyediakan jasa ekosistem dapat menjadi dasar untuk mengklaim hak atas kredit karbon yang dihasilkan oleh kegiatan NbS. IP & LC, pengelola lahan, dan pemilik lahan dapat mengalihkan hak karbon kepada pengembang kegiatan VCM atau pemerintah sebagai imbalan atas pertimbangan mereka dalam perjanjian pembagian manfaat.

Kepemilikan lahan dan hutan yang aman dan jelas akan berdampak baik terhadap penentuan hak atas karbon untuk kegiatan NbS, tetapi kepemilikan lahan dan sumber daya seringkali diperebutkan. Sertifikat tanah yang tidak jelas dan tumpang tindih, pengakuan hak adat yang terbatas, perampasan tanah, perambahan, dan perampasan warisan atau pengusiran tanah mempersulit pembentukan hak atas karbon. Di banyak yurisdiksi, tata kelola lahan yang lemah, korupsi, dan diskriminasi terhadap kelompok-kelompok yang mengklaim sertifikat tanah yang tidak diakui turut memperburuk tantangan ini. Bahkan ketika undang-undang dan kepemilikannya jelas, pengembang aktivitas mungkin berjuang untuk menjamin hak untuk mendapatkan keuntungan dari aktivitas VCM.

Standar emisi GRK berusaha untuk mengatasi tantangan ini dengan mengharuskan pengembang kegiatan VCM untuk menunjukkan bahwa mereka terlibat dalam

konsultasi dengan pemangku kepentingan di lapangan dan mengembangkan **pengaturan pembagian manfaat**. Beberapa standar mengharuskan pengembang aktivitas VCM mengikuti proses *Free, Prior, and Informed Consent (FPIC)* saat bekerja dengan **IP & LC**.

Pengaturan pembagian manfaat adalah sarana untuk mendistribusikan manfaat moneter dan non-moneter yang dihasilkan oleh aktivitas VCM kepada mereka yang dapat mengklaim hak atas karbon. Penerima manfaat sering kali menyertakan IP & LC. Pengaturan pembagian manfaat biasanya akan mempertimbangkan siapa yang mengelola hutan atau lahan, siapa yang memegang sertifikat tanah, dan siapa yang berinvestasi dalam kegiatan pengurangan dan penyerapan emisi GRK. Masyarakat rentan yang tinggal berdekatan dengan kegiatan mitigasi berbasis lahan perlu dimasukkan dalam pengaturan pembagian manfaat yang adil. Inklusivitas sangat penting untuk memastikan keberlanjutan jangka panjang kegiatan VCM.

Mengapa pemerintah perlu mengklarifikasi hak atas karbon dalam VCM dan bagaimana caranya?

Negara tuan rumah akan diuntungkan jika dapat mengatur hak atas karbon dan pendanaan

karbon yang berkepastian hukum. **Pengembang dan pemodal aktivitas VCM** lebih suka beroperasi di wilayah di mana mereka yakin bahwa mereka mampu untuk menyelesaikan semua kegiatan yang direncanakan dan di mana perjanjian yang dibuat dengan **IP & LC**, individu, atau pemerintah akan dihormati. Kegiatan NbS, khususnya, membutuhkan kepastian hukum, karena sering dirancang untuk diselesaikan selama beberapa dekade dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan lokal.

Hak atas karbon dan aset dasar harus memperhitungkan hak kepemilikan tanah adat dan leluhur IP & LC. Di banyak ekosistem, IP & LC telah mengelola atau menggunakan sumber daya lahan secara berkelanjutan selama berabad-abad tetapi masih belum memperoleh pengakuan formal atas hak-hak mereka. Sangat penting bahwa hukum terkait hak atas karbon disusun secara adil, dengan perlindungan bagi semua orang yang memegang hak formal dan informal di lahan dan hutan.

Negara tuan rumah dapat menghindari perselisihan tentang hak atas karbon dengan mengatur hak kepemilikan lahan dan dengan menetapkan aturan untuk pengaturan pembagian manfaat. Negara tuan rumah dapat selangkah lebih jauh dengan mengklarifikasi persyaratan pajak, perhitungan, dan peraturan yang tepat yang berlaku untuk kredit

karbon. Negara tuan rumah juga dapat membuat peraturan untuk memandu pembagian manfaat dan konsultasi publik. Ketika membuat peraturan semacam itu, disarankan agar legislator mengklarifikasi sikap negara terhadap hak atas karbon daripada mendefinisikan kategori hak baru. Ada risiko *overregulating* hak atas karbon dan pasar, khususnya jika aturan dibuat dan tidak ditegakkan, kategori hak baru dibuat dan mempersulit, atau lapisan lain dari hak yang saling bertentangan diletakkan pada sistem sertifikat tanah dan properti yang dari awal sudah lemah.

Tabel 10.1 Beberapa contoh sistem hak atas karbon

Kepemilikan tanah atau lahan	Hak atas karbon	Hak entitas non-pemerintah untuk terlibat dalam kegiatan pengimbangan karbon	Contoh
Semua lahan dimiliki oleh pemerintah	Hak karbon mengikuti hak atas lahan dan dimiliki oleh negara	Hak karbon dapat ditransfer ke entitas swasta dan publik melalui konsesi atau izin	Republik Demokratik Kongo, Mozambik, Vietnam
Kepemilikan lahan yang beragam, seringkali dengan sertifikat yang lemah dan hak atas tanah yang terbatas	Hak atas karbon (atau hak atas jasa ekosistem) dipusatkan dan dikelola di tingkat pemerintah nasional	Proyek atau transaksi swasta yang melibatkan pengurangan dan penyerapan emisi GRK tidak diizinkan	Madagaskar, Ekuador
Kepemilikan lahan yang beragam, seringkali dengan sertifikat yang lemah dan hak atas tanah yang terbatas	Hak atas karbon diatur dan aturan khusus berlaku	Entitas swasta bebas berpartisipasi dalam proyek pasar karbon sukarela yang tunduk pada pembatasan	Meksiko (membatasi pengurangan dan penghilangan emisi GRK swasta untuk kegiatan penghilangan karbon), Peru (aktivitas dan kepemilikan)
Kepemilikan lahan yang beragam dengan posisi entitas swasta yang terbilang kuat	Hak karbon berkaitan erat dengan pemilik lahan	Entitas swasta bebas untuk berpartisipasi dalam proyek pasar karbon sukarela selama berada dalam batas-batas hukum mengenai penggunaan lahan dan perlindungan	Chili, Kosta Rika

Berdasarkan Streck 2020 *Who owns REDD+?*

Bacaan lebih lanjut

Fleischman, F., Basant, S., Fischer, H., Gupta, D., Garcia Lopez, G., Kashwan, P., et al. (2021). *How politics shapes the outcomes of forest carbon finance*. *Current Opinion in Environmental Sustainability*, 51, 7–14.
<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877343521000178>

Lofts, K., Frechette, A., & Kumar, K. (2021). *Status of Legal Recognition of Indigenous Peoples', Local Communities' and Afro-descendant Peoples' Rights to Carbon Stored in Tropical Lands and Forests*. Retrieved September 30, 2021, from
<https://rightsandresources.org/publication/carbon-rights-brief/>

Streck, C. (2020). *Who Owns REDD+? Carbon Markets, Carbon Rights and Entitlements to REDD+ Finance*. *Forests*, 11(9), 959.
<https://www.mdpi.com/1999-4907/11/9/959>

Ucapan Terima Kasih

Penulis: Melaina Dyck, Charlotte Streck, dan Danick Trouwloon

Desainer: Sara Cottle

Kontributor: Darragh Conway, Laura Carolina Sepúlveda, dan Theda Vetter

Terjemahan ke Bahasa Indonesia: Bruce Mecca

Tanggal publikasi: Oktober 2023

Voluntary Carbon Market Explained (VCM Primer) didukung oleh *Climate and Land Use Alliance (CLUA)*. Para penulis berterima kasih kepada pengulas dan mitra yang dengan murah hati menyumbangkan pengetahuan dan keahlian untuk *Primer* ini.